

PENGUATAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PENGEMBANGAN PETERNAKAN RUMINANSIA

Ahmad Sahab^{1*}, Dudung Darusman², Muladno³

¹Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan, Sekolah Pascasarjana
Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor 16680
Email : ahmadsahab46@gmail.com

²Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan IPB

³Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan Fakultas Peternakan IPB

RINGKASAN

Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak perlu melibatkan masyarakat lokal untuk mencapai tujuan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur potensi hijauan makanan ternak di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, khususnya di Kecamatan Cicurug Sukabumi dan merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat berbasis pengembangan peternakan ruminansia dengan memanfaatkan tumbuhan pakan ternak yang ada di daerah itu. Metode yang digunakan terdiri atas wawancara semi-terstruktur, *focus group discussion*, pengamatan, dan pengukuran di lapangan. Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak khususnya di Kecamatan Cicurug memiliki potensi hijauan makanan ternak sebesar 5880.422 ton per tahun dengan daya tampung sebesar 938.203 satuan ternak per tahun. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat yang paling tepat adalah strategi *Strength-Opportunity*, yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mendapatkan peluang yang ada.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, peternakan ruminansia, tumbuhan pakan ternak, TNGHS

PERNYATAAN KUNCI

- ◆ Taman Nasional Gunung Halimun Salak merupakan kawasan pelestarian alam terluas di Pulau Jawa yang memiliki keanekaragaman yang tinggi dan merupakan sistem penunjang kehidupan di sekitarnya.
- ◆ Pengelolaan TNGHS menghadapi berbagai masalah seperti penebangan liar, penambangan liar, perambahan, perburuan liar, konflik sosial, dan lain-lain yang mengakibatkan kerusakan hutan.
- ◆ Sumber daya baik SDM maupun dana yang dimiliki Balai TNGHS kurang optimal untuk mengelola TNGHS.
- ◆ Terdapat 99 ribu jiwa penduduk yang tinggal di

348 kampung yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan yang dapat menjadi ancaman atau potensi dalam pengelolaan TNGHS.

- ◆ Penanganan masalah dengan cara represif dan koersif dinilai kurang efektif. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan TNGHS secara kolaboratif dengan memberdayakan masyarakat lokal.
- ◆ TNGHS memiliki potensi tumbuhan pakan ternak yang tinggi dan dapat dijadikan sarana dalam pemberdayaan masyarakat lokal.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

- ◆ Melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar TNGHS dalam hal pengembangan kapasitas dan ekonomi masyarakat.
- ◆ Membangun kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan TNGHS secara kolaboratif.
- ◆ Memberikan akses yang terkontrol kepada masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan pakan ternak di TNGHS untuk pengembangan usaha peternakan masyarakat di kampung-kampung sekitar TNGHS.
- ◆ Menghimpun dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan akademisi dalam pengelolaan TNGHS secara kolaboratif tersebut.

I. PENDAHULUAN

Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) merupakan kawasan pelestarian alam di Pulau Jawa yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan merupakan penunjang sistem kehidupan bagi masyarakat di

sekitarnya (BTNGHS 2007). Akan tetapi pentingnya peran TNGHS tersebut terancam dengan berbagai upaya perusakan hutan seperti perambahan hutan, pencurian kayu, penambangan ilegal, perburuan liar, dan lain sebagainya yang menyebabkan deforestasi. Dalam kurun waktu tahun 2000–2010 TNGHS telah mengalami deforestasi sebesar 5,5% (Ilyas *et al.*, 2014). Tingginya tekanan tersebut juga tidak diimbangi dengan kapasitas baik SDM maupun dana yang memadai (Adalina, 2014). Penanganan masalah kerusakan hutan secara represif dan koersif dinilai kurang efektif. Oleh karena itu diperlukan cara-cara preventif dan persuasif melalui manajemen TNGHS secara kolaboratif dengan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan TNGHS.

Masyarakat lokal merupakan salah satu pemangku kepentingan yang memiliki potensi dalam pengelolaan TNGHS kolaboratif. Hasil survey kampung yang dilaksanakan oleh JICA dan BTNGHS (2007) menunjukkan bahwa terdapat 348 kampung yang berada di dalam dan sekitar kawasan TNGHS dengan jumlah penduduk sekitar 99.000 jiwa. Sebagian besar masyarakat di sekitar TNGHS memanfaatkan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kayu bakar, pakan ternak, air, tumbuhan obat, bambu, lahan pertanian, dan lain-lain (Widada dan Darusman, 2004; Harada, 2005; Wardah, 2009). Darusman (2000) menyatakan bahwa masyarakat yang dapat memperoleh manfaat dari suatu hutan akan cenderung berupaya untuk melestarikan hutan tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sekitar TNGHS mampu mengelola hutan dengan baik (Rahmawati *et al.*, 2008; Hendarti, 2008; Adalina, 2014). Reed *et al.* (2009) berpendapat bahwa semakin tinggi kepentingan

dan pengaruh suatu pihak, maka semakin tinggi pula keperluan pihak tersebut untuk dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Tumbuhan pakan ternak merupakan salah satu hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar TNGHS untuk memelihara ternak ruminansia. Akan tetapi, sebagian besar usaha peternakan yang dijalankan hanya sebatas usaha sampingan dan tabungan sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Muladno (2013) untuk meningkatkan penghasilan usaha peternakan rakyat diperlukan penguatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat yang profesional. Salah satu konsep pemberdayaan masyarakat di bidang peternakan adalah Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) yang dikembangkan oleh Institut Pertanian Bogor. Konsep SPR yaitu bagaimana mengembangkan kapasitas peternak skala kecil dalam hal teknis dan non-teknis peternakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, IPTEK, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga terbentuk kelembagaan masyarakat peternak yang berorientasi bisnis dan mampu mensejahterakan masyarakat (Muladno 2014)¹.

TNGHS diduga memiliki potensi tumbuhan pakan ternak yang cukup besar. Pengembangan usaha peternakan masyarakat dengan memanfaatkan tumbuhan pakan ternak yang terintegrasi dengan pengelolaan taman nasional bersama masyarakat diharapkan dapat menjadi suatu model pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur potensi tumbuhan pakan ternak di kawasan TNGHS, mengkaji potensi masyarakat dalam pengelolaan TNGHS, serta merumuskan

strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan TNGHS kolaboratif yang mengintegrasikan antara pengelolaan taman nasional bersama masyarakat dengan pengembangan usaha ternak masyarakat secara profesional.

II. SITUASI TERKINI

Penelitian ini dilaksanakan di empat kampung sekitar TNGHS yaitu: Kampung Kuta Desa Kutajaya, Kampung Cikurutug Desa Pasawahan, Kampung Cipari Girang Desa Tenjolaya, dan Kampung Cileueur Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Keempat kampung ini merupakan kampung yang berbatasan langsung dengan kawasan TNGHS wilayah Resort Kawah Ratu Seksi Kabupaten Sukabumi. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kampung Kuta, Cikurutug, Cipari Girang, dan Cileueur masing-masing adalah 325, 248, 185, 223 KK. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai buruh tani sambil memelihara ternak sebagai usaha sampingan. Pada umumnya masyarakat sangat bergantung pada sumber daya hutan, terutama sebagai sumber air. Selain air, masyarakat juga memanfaatkan hasil hutan bukan kayu seperti tumbuhan pakan ternak, kayu bakar, tumbuhan obat, getah damar, bambu, dan lain-lain.

Potensi tumbuhan pakan ternak di TNGHS

Luas wilayah TNGHS Resort Kawah Ratu Kecamatan Cicurug Sukabumi yang menjadi sumber Hijauan Makanan Ternak (HMT) masyarakat adalah 201,95 ha yang terdiri dari tutupan lahan berupa hutan sekunder (5,01%), tegakan agathis (*Agathis loranthifolia*) (38,62%), tegakan kaliandra (*Calliandra calothyrsus*) (8,71%),

¹Komunikasi pribadi tanggal 27 Oktober 2014

Tabel 1. Luas dan produktivitas HMT tutupan lahan TNGHS yang menjadi sumber pakan ternak masyarakat

Tutupan Lahan	Luas		Produktivitas (ton/ha/th)	Total potensi HMT (ton/th)
	Ha	%		
Hutan sekunder	10,12	5,01	16,21	164,08
Semak belukar	96,25	47,66	32,74	3.151,57
Tegakan agathis	78	38,62	28,73	2.241,14
- Daun agathis			(9,39)	(732,42)
- Tumbuhan bawah			(19,34)	(1.508,72)
Tegakan kaliandra	17,58	8,71	18,41	323,63
- Daun kaliandra			(8,00)	(140,64)
- Tumbuhan bawah			(10,41)	(182,99)
Total	201,95	100		5.880,42

dan semak belukar (47,66%). Jenis tumbuhan terdiri atas kelompok pohon dan permudaannya, rumput, herba, dan paku-pakuan. Produktivitas HMT diukur pada petak contoh ukuran 2 m x 2 m dengan cara memangkas bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak kemudian dibiarkan tumbuh selama 30 hari. Setelah 30 hari bagian tumbuhan tersebut dipangkas kembali dan ditimbang sehingga diperoleh besar produktivitas HMT per 30 hari per luasan 4 m². Data produktivitas kemudian dikonversi ke dalam satuan ton/ha/tahun. Jumlah petak contoh sebanyak 10 petak pada masing-masing tutupan lahan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa produktivitas HMT tertinggi terdapat pada tutupan lahan semak belukar yaitu 32,74 ton/ha/th. Produktivitas HMT terendah terdapat pada tutupan lahan hutan sekunder sebesar 16,21 ton/ha/th. Secara keseluruhan total potensi HMT yang terdapat di wilayah tersebut adalah 5.880,42 ton/tahun. Rincian luas dan produktivitas HMT masing-masing tutupan lahan dapat dilihat pada Tabel 1.

Dengan rata-rata tingkat kebutuhan HMT per satuan ternak (ST) adalah 6,268 ton per tahun

(Parakkasi, 1999) maka kawasan TNGHS Kecamatan Cicurug memiliki daya tampung sebesar 938,20 ST/tahun. Apabila ternak yang dikembangkan adalah sapi potong dengan harga jual Rp 13.000.000 per ekor maka potensi pendapatan yang dapat diperoleh adalah sebesar Rp 12.196.639.702 per tahun. Dengan kemampuan rata-rata masyarakat memelihara sapi potong sebanyak 3 ekor per orang, maka potensi HMT di TNGHS dapat dimanfaatkan oleh 312 orang. Pendapatan yang dapat diperoleh dari usaha pemeliharaan sapi tersebut adalah sebesar Rp 39.000.000 per tahun. Dengan demikian pemanfaatan tumbuhan pakan ternak di taman nasional diharapkan dapat meningkatkan penghasilan masyarakat sehingga dapat mencegah kerusakan hutan.

Potensi sumber daya manusia

1. Karakteristik peternak

Karakteristik peternak yang diamati yaitu jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, penghasilan, pengalaman beternak, dan jumlah ternak yang dimiliki. Rincian masing-masing karakteristik peternak dapat dilihat pada Tabel 2. Sebagian

Tabel 2. Karakteristik peternak di lokasi penelitian

Kampung	Jumlah responden	Jenis Kelamin (%)			Umur rata-rata (th)	Tingkat Pendidikan	Penghasilan (Rp/bln)	Pengalaman Beternak (th)	Jumlah ternak (ST)
		N	L	P					
Kuta	30	100	0	44,34	SD	1.498.077	21,93	1,00	
Cikurutug	30	100	0	43,70	SD	1.400.000	19,97	1,53	
Cipari Girang	30	96,67	3,33	45,53	SD	1.114.782	21,17	1,04	
Cileueur	30	96,67	3,33	44,86	SD	1.480.000	21,4	1,50	

besar usaha peternakan di empat kampung dijalankan oleh laki-laki usia produktif dengan usia rata-rata 43–46 tahun. Menurut Kadir (2005) pada umumnya petani yang berusia produktif mampu menerima dengan cepat inovasi atau ide-ide baru yang dianjurkan dibandingkan dengan petani yang berusia tidak produktif. Rata-rata tingkat pendidikan di keempat kampung adalah tamatan SD. Rata-rata penghasilan per bulan masyarakat masih berada di bawah upah minimum Kabupaten Sukabumi sebesar Rp 1.940.000. Rendahnya penghasilan masyarakat ini perlu menjadi perhatian serius karena dapat menjadi pemicu terjadinya kerusakan hutan (Yatap 2008; Nurrochmat *et al.*, 2012; Ilyas *et al.*, 2014).

Dalam hal pengalaman beternak, umumnya masyarakat di empat kampung memiliki pengalaman beternak lebih dari 10 tahun. Jumlah ternak yang dimiliki masyarakat tergolong sedikit, yaitu berkisar antara 1–1,3 satuan ternak. Krisna dan Manshur (2006) berpendapat bahwa penghasilan dari ternak skala kecil akan menghasilkan penghasilan yang rendah. Menurut Muladno (2013) sedikitnya jumlah ternak yang dimiliki petani membuat posisi tawar petani menjadi lemah sehingga usaha peternakan yang dijalankan belum mampu meningkatkan

kesejahteraan petani.

2. Modal sosial

Modal sosial adalah segala hal yang berkaitan dengan kerjasama dalam masyarakat, yang memberikan manfaat bersama untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan ditopang oleh unsur-unsur seperti kepercayaan, jaringan sosial, norma sosial, tindakan yang proaktif dan kepedulian (Hasbullah, 2006). Modal sosial yang merupakan salah satu faktor yang mendorong munculnya aksi bersama yang positif dalam masyarakat. Nurrochmat *et al.* (2012) berpendapat bahwa dalam hal pengelolaan sumber daya alam, modal sosial masyarakat dapat digunakan untuk menentukan pola pengelolaan sumber daya hutan serta menentukan aktor yang terlibat. Di TNGHS, hasil penelitian Adalina (2014) menunjukkan bahwa semakin tinggi modal sosial maka semakin tinggi juga tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan TNGHS. Dalam bidang peternakan modal sosial juga memiliki pengaruh dalam meningkatkan pendapatan dari usaha peternakan (Priyono & Utami, 2012; Pratisthita *et al.*, 2014; Nafiqoh, 2015). Nilai modal sosial masyarakat di lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.

Masyarakat Kampung Kuta dan Kampung Cikurutug memiliki modal sosial yang tinggi. Masyarakat Kampung Cipari Girang dan Cileueur

Tabel 3 Tingkat modal sosial masyarakat sekitar TNGHS

No	Kampung	Unsur Modal Sosial						Jumlah	Keterangan
		1	2	3	4	5	6		
1	Kuta	40,93	20,73	19,63	22,73	21,00	21,90	146,93	Tinggi
2	Cikurutug	38,03	19,37	19,57	22,63	20,07	22,27	141,93	Tinggi
3	Cipari Girang	38,27	18,80	19,07	20,33	17,93	22,43	136,83	Sedang
4	Cileueur	38,53	19,20	19,03	22,53	18,33	22,37	140,00	Sedang
	Rata-rata	38,94	19,53	19,33	22,06	19,33	22,24	141,43	Sedang

Keterangan: 1) kepercayaan; 2) jaringan; 3) norma; 4) tindakan proaktif; 5) kepedulian lingkungan 6) kepedulian sesama

memiliki modal sosial sedang. Secara keseluruhan masyarakat di empat kampung tersebut memiliki modal sosial sedang. Menurut Uphoff (2000) masyarakat dengan modal sosial sedang memiliki komitmen terhadap upaya bersama dan akan bekerjasama bila memberikan keuntungan kepada orang lain. Masyarakat dengan modal sosial tinggi memiliki komitmen terhadap kesejahteraan orang lain dan mampu bekerjasama baik untuk manfaat bagi diri sendiri maupun demi kebaikan bersama. Menurut Birner & Wittmer (2000) masyarakat yang memiliki modal sosial yang kuat dapat dilibatkan dalam pengelolaan hutan baik secara kolaboratif maupun pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

3. Kesiapan masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan TNGHS

Adanya barang dan jasa hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat menunjukkan adanya kepentingan masyarakat terhadap sumber daya hutan di TNGHS. Selain itu, tingginya aktivitas masyarakat dan besarnya jumlah populasi penduduk di sekitar TNGHS juga membuat masyarakat memiliki pengaruh baik positif maupun negatif terhadap kelestarian TNGHS. Menurut Reed *et al.* (2009) *stakeholder* yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi

merupakan pemain kunci yang perlu dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Terdapat 10 bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan TNGHS (Tabel 4). Masyarakat Kampung Kuta dan Kampung Cipari Girang memiliki tingkat ketersediaan berpartisipasi yang tinggi. Adapun masyarakat Kampung Cikurutug dan Cileueur memiliki tingkat ketersediaan berpartisipasi sedang. Secara keseluruhan tingkat kesediaan berpartisipasi masyarakat termasuk tinggi.

III. ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI/PENANGANAN

Faktor internal dan eksternal

Berdasarkan situasi terkini di atas, dapat diidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal menggunakan analisis SWOT sebagai dasar dalam perumusan strategi pemberdayaan masyarakat yang tepat. Terdapat 8 faktor kekuatan (*strength*), 6 faktor kelemahan (*weakness*), 8 faktor peluang (*opportunity*), dan 7 faktor ancaman (*threat*). Bobot masing-masing faktor tersebut berturut-turut adalah 0,580, 0,420, 0,650, dan 0,350. Nilai bobot tersebut menunjukkan bahwa dari sisi internal faktor kekuatan lebih dominan dibandingkan

dengan faktor kelemahan. Adapun dari sisi eksternal faktor peluang memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan faktor ancaman. Rincian nilai faktor internal dan eksternal analisis SWOT dapat dilihat pada Tabel 5.

Berdasarkan nilai pengaruh yang diperoleh, kesediaan masyarakat berpartisipasi merupakan faktor internal yang memiliki nilai pengaruh terbesar, yaitu 0,363. Dengan keterbatasan kapasitas yang dimiliki Balai TNGHS partisipasi masyarakat sekitar TNGHS sangat diperlukan dalam pengelolaan TNGHS. Anderson (2000) dalam (Nurrochmat, 2005) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat memiliki potensi menuju pengelolaan hutan yang lebih baik. Faktor kelemahan yang memiliki nilai pengaruh terbesar

adalah lemahnya kondisi ekonomi masyarakat.

Tabel 6 di atas menunjukkan faktor peluang yang memiliki nilai pengaruh terbesar adalah potensi hijauan makanan ternak (HMT), yaitu 0,381. Hasil analisis potensi hijauan makan ternak menunjukkan bahwa kawasan TNGHS memiliki potensi HMT yang tinggi. Selain dari kawasan TNGHS masyarakat juga memperoleh hijauan makanan ternak dari areal lain baik berupa kebun masyarakat maupun milik perusahaan perkebunan dan peternakan ayam yang terdapat di sekitar kampung. Faktor ancaman yang memiliki nilai pengaruh terbesar adalah maraknya perkembangan industri non-pertanian baik formal maupun non-formal. Data BPS Kabupaten Sukabumi (2014) menunjukkan

Tabel 4 Kesediaan masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan TNGHS

No	Bentuk partisipasi masyarakat	Skor				Rata-rata
		Kuta	Cikurutug	Cipari Girang	Cileueur	
1	Mendukung kebijakan dalam pengelolaan TNGHS	118	111	114	114	114,25 (T)
2	Berpartisipasi dalam penyusunan rencana pengelolaan TNGHS	98	100	104	95	99,25 (S)
3	Menyadarkan masyarakat untuk melestarikan hutan	93	97	100	90	95 (S)
4	Merhabilitasi hutan	112	108	112	112	111 (T)
5	Tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak hutan	127	121	119	123	122,5 (T)
6	Menegur setiap orang yang melakukan kegiatan perusakan hutan	82	82	96	71	82,75 (S)
7	Menjaga keamanan taman nasional (ikut berpatroli)	97	101	106	91	98,75 (S)
8	Melaporkan setiap tindakan perusakan hutan yang diketahui kepada petugas Balai TNGHS	69	74	84	56	70,75 (R)
9	Memanfaatkan HHBK dan jasa lingkungan secara lestari	123	112	118	110	115,75 (T)
10	Mengikuti program pengembangan usaha peternakan yang terintegrasi dengan pengelolaan TNGHS	116	113	117	110	114 (T)
Total		1035	1019	1070	972	1024
Keterangan		Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi

Keterangan: T = tinggi S = sedang R = rendah

Tabel 5. Faktor internal kekuatan dan kelemahan dan nilai pengaruhnya

Faktor Internal	Rata-rata bobot	Rata-rata rating	Nilai Pengaruh
KEKUATAN			
1. Ketersediaan masyarakat berpartisipasi	0,12	3	0,36
2. Pengetahuan masyarakat akan fungsi hutan	0,07	2	0,14
3. Lokasi kampung yang berdekatan dengan TNGHS	0,06	3	0,18
4. Modal sosial masyarakat	0,08	2	0,16
5. Ketergantungan masyarakat akan hutan	0,05	3	0,16
6. Keterampilan beternak	0,09	3	0,26
7. Adanya kelembagaan masyarakat di bidang lingkungan dan peternakan	0,06	2	0,13
8. Kualitas SDM TNGHS yang cukup baik	0,05	2	0,09
Sub-total kekuatan	0,58		1,48
KELEMAHAN			
1. Keterbatasan jumlah SDM dan dana pengelolaan TNGHS	0,06	2	0,11
2. Lemahnya kondisi ekonomi masyarakat	0,09	2	0,17
3. Masyarakat merasa sungkan/takut dengan petugas TNGHS	0,05	3	0,15
4. Kurangnya minat masyarakat dalam usaha peternakan	0,06	1	0,06
5. Sedikitnya waktu yang dimiliki masyarakat untuk mengurus hutan	0,08	1	0,08
6. Kurangnya kemampuan masyarakat dalam memelihara ternak dalam jumlah banyak dan berkelompok	0,08	1	0,08
Sub-total kelemahan	0,42		0,67
Kecenderungan terhadap faktor internal	1,00		0,81

terdapat 35 industri formal dan 56 industri non-formal di Kabupaten Sukabumi dengan jumlah serapan tenaga kerja masing-masing 1.027 dan 869 orang. Menjadi buruh di industri non-pertanian lebih menarik bagi sebagian besar masyarakat karena penghasilan yang diperoleh lebih pasti.

Hasil analisis SWOT di atas menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal memiliki nilai positif, yaitu (0,81; 1,14). Hal ini menandakan bahwa faktor kekuatan dan peluang memiliki nilai pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan faktor kelemahan dan ancaman. Menurut Rangkuti (2008) tipe strategi yang paling tepat untuk kondisi tersebut adalah strategi SO (*Strength-Opportunity*), yaitu menggunakan seluruh

kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada secara optimal. Strategi pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan adalah membangun kerjasama antara Balai TNGHS dengan masyarakat dengan dukungan berbagai pihak dalam pengelolaan TNGHS kolaboratif dengan pengembangan ekonomi fokus pada pengembangan peternakan ruminansia.

Balai TNGHS memiliki konsep pemberdayaan masyarakat berupa Model Kampung Konservasi (MKK), yaitu pendekatan model konservasi yang memberi peluang kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi untuk terlibat aktif dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi serta pemanfaatan sumber daya hutan (Harmita, 2007).

Integrasi antara konsep MKK dengan Sekolah Peternakan Rakyat yang dikembangkan oleh IPB dapat dijadikan sebagai konsep pemberdayaan masyarakat sekitar hutan untuk mencapai tujuan kelestarian taman nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 6. Faktor eksternal peluang dan ancaman dan nilai pengaruhnya

Faktor Eksternal	Rata-rata bobot	Rata-rata rating	Nilai Pengaruh
PELUANG			
1. Potensi HMT yang besar	0,13	3	0,38
2. Program CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar TNGHS	0,05	2	0,11
3. Potensi pasar ternak	0,12	3	0,37
4. Program pendampingan peternakan dari IPB	0,06	2	0,11
5. Program pemberdayaan masyarakat oleh Balai TNGHS	0,09	2	0,18
6. Dukungan dari Pemerintah Daerah	0,05	2	0,10
7. Kebijakan yang mendukung pemanfaatan SDH Taman Nasional	0,12	2	0,24
8. Adanya penyuluh peternakan tingkat kecamatan	0,03	2	0,06
Sub-total kekuatan	0,65		1,55
ANCAMAN			
1. Upaya perusakan hutan	0,06	1	0,06
2. Luasnya hutan TNGHS terdegradasi	0,03	2	0,05
3. Maraknya perkembangan industri non-pertanian	0,04	2	0,08
4. Pencurian ternak	0,03	1	0,03
5. Penyakit ternak	0,07	1	0,07
6. Tingkat kematian ternak	0,06	1	0,06
7. Tingginya harga bibit ternak	0,04	1	0,04
8. Peredaran daging impor di pasaran	0,02	1	0,02
Sub-total kelemahan	0,35		0,41
Kecenderungan terhadap faktor eksternal	1,00		1,14

REFERENSI

- Adalina, Y. 2014. Implikasi Modal Sosial Masyarakat terhadap Pengelolaan Taman Nasional (Studi Kasus Taman Nasional Gunung Halimun Salak). Disertasi. Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan Sekolah Pascasarjana IPB: Bogor.
- [BTNGHS] Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. 2007. Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halmun Salak 2007–2027. Balai TNGHS: Sukabumi.
- Birner, R., Wittmer, H. 2000. Converting Social Capital into Political Capital. How Do Local Communities Gain Political Influence? A Theoretical Approach and Empirical Evidence from Thailand and Columbia. Paper submitted to the 8 Biennial Conference of the International Association for the Study of Common Property (IASCP). Institut of Rural Development. Georg-August University, Gottingen.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi. 2014. Perusahaan industri formal menurut jenis industry. [Http://sukabumikab.bps.go.id/index.php?hal=tabel&id=6.11](http://sukabumikab.bps.go.id/index.php?hal=tabel&id=6.11) [20 Juni 2015].
- Darusman, D. 2000. Dimensi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Hutan. Laboratorium Poleksos Fahatan. IPB: Bogor.
- Harada, K. 2005. Local Use of Agricultural Lands and Natural Resources as the Commons in Gunung Halimun National Park, West Java, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 12(2005): pp 34-47.
- Harmita, D. 2007. Model Kampung Konservasi. GHSNP-MP: Sukabumi
- Hasbullah, J. 2006. Sosial Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia). Cetakan Pertama. MR-United Press: Jakarta.
- Hendarti, L. 2008. Menepis Kabut Halimun: Rangkaian Bunga Rampai Pengelolaan Sumber Daya Alam. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Ilyas, M., Munibah, K., Rusdiana, O. 2014. Analisis Spasial Perubahan Penggunaan Lahan dalam Kaitannya dengan Pemanfaatan Zonasi Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *Jurnal Globe*, Vol. 16 (1) 2014: pp 37–46.
- Kadir, A. 2005. Pengembangan Sosial Forestry di Spuc Borisallo: Analisis Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat. *Info Sosial Ekonomi. Puslitbang Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan*, 5 (2) 2005: 297–309.
- Krisna, R., Manshur, E. 2006. Tingkat Pemilikan Sapi (Skala Usaha) Peternakan dan Hubungannya dengan Keuntungan Usaha Tani Ternak pada Kelompok Tani Ternak Sapi Perah di Desa Tajur Halang Bogor. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, Vol. 1 (1): 61-64.
- Muladno, 2013. *Realita di Luar Kandang. Permata Wacana Lestari*: Jakarta.
- Nafiqoh, N. 2015. Modal Sosial dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Kelompok Tani Ternak Sumber Rejeki Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3 (2) 2015: pp 211-217.
- Nurrochmat, D.R. 2005. Strategi Pengelolaan Hutan: Upaya Menyelamatkan Rimba yang Tersisa. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Nurrochmat, D.R., Hasan, M.F., Suharjito, D., Hadianto, A., Ekayani, M., Sudarmalik, Purwawangsa, H., Mustaghfirin, Ryandi, E.D. 2012. *Ekonomi Politik Kehutanan. Mengurangi Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan*. INDEF: Jakarta.
- Priyono, Utami, D.P. 2012. Penguatan Modal Sosial dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Peternak Sapi Potong di Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Surya Agritama*, Vol 1 (1) 2012: pp 1-10.
- Pratisthita, R.N., Munandar, M., Homzah, S. 2014. Peran Modal Sosial dalam Menunjang Dinamika Kelompok Peternak Sapi Perah (Studi Kasus di Kelompok 3 TPK Pulosari Pangalengan). *Jurnal Ilmu Ternak*, Vol 1 (10) 2014: pp 52–57.
- Rahmawati, R., Subair, Idris., Gentini., Ekowati, D., Setiawan, U. 2008. Pengetahuan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan: Adaptasi, Konflik, dan Dinamika Sosio-Ekologis. *Jurnal Transdidiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. Vol 2

- (2): pp 151-190.
- Rangkuti, F. 2008. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Reed, M.S., Graves, A., Dandy, N.H., Posthumus, K., Hubacek, J., Morris, C., Prell, C.H., Quinn, L.C., Stringer. 2009. Who's in and Why? a Typology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resource Management. *Journal of Environmental Management*, 90 (2009): pp 1933–1949.
- Uphoff, N. 2000. Understanding Social Capital: Learning from the Analysis and Experience of Participation. P Dasgupta, I. Seragelin, editors. *Social Capital Multifaceted Perspective*. The World Bank: Washington DC.
- Wardah. 2009. Potensi Keanekaragaman Tumbuhan Obat untuk Pasca Bersalin di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kasepuhan Desa Cisungsang, Banten Selatan. *Jurnal Bahan Alam Indonesia*, 7 (1) 2009: pp 5-11.
- Widada., Darusman, D. 2004. Nilai Ekonomi Air Domestic dan Irigasi Pertanian: Studi Kasus Desa-Desa Sekitar Taman Nasional Gunung Halimun. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 10 (1) 2004: pp 15-27.
- Yatap, H. 2008. Pengaruh Peubah Sosial Ekonomi terhadap Perubahan dan Penggunaan Penutupan Lahan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Tesis. Program Studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan Sekolah Pascasarjana IPB: Bogor.